

## TELAH BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BISNIS DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA GLOBAL

Oleh :  
Sri Handayani

Kebijakan ekonomi dan hukum yang dituangkan dalam GBHN, yaitu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar serta mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan pranata bisnis di Indonesia dewasa ini. Konsekuensinya, diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perjanjian Putaran Uruguay dalam kerangka WTO yang telah ditandatangani dan diratifikasi. Beberapa telaah terhadap Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang diutarakan demi mendukung konsep sustainable development.

### Pendahuluan

Globalisasi merupakan proses yang terus berubah yang tidak mungkin terelakkan bagi masyarakat dunia. Memasuki era abad 21 saat ini, proses global telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, di bidang ekonomi, budaya, politik, lingkungan, teknologi dan informasi. Bahwa proses globalisasi juga meningkatkan saling hubungan masyarakat dunia di dalam seluruh sendi kehidupan, diutarakan George C. Lodge sebagai berikut:

*"Globalization is the proces where the world's people are becoming increasingly interconnected in facets of their lives-cultural, economic, political, technological an environmental"*

Peningkatan saling hubungan masyarakat dunia tersebut seringkali direspon oleh negara-negara berkembang sebagai suatu ancaman bagi ekonomi nasional. Sesungguhnya globalisasi tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif. Salah satu dampak positif globalisasi yang dirasakan berbagai negara adalah peningkatan perdagangan dan investasi serta terbukanya kesempatan kerja. Di sisi negatif, globalisasi mendatangkan badai krisis ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan bertambahnya jumlah pengangguran, termasuk di negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik ini Indonesia